

PERTEMUAN 5

KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti materi pada pertemuan ke-5 ini mahasiswa mampu mengetahui berbagai macam aplikasi komputer yang banyak digunakan berbagai instansi pemerintah, termasuk fungsi dan kegunaannya.

B. URAIAN MATERI

1. E-government

Pesatnya perkembangan teknologi internet sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat. Hadirnya teknologi internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai macam aktifitas.

Bidang pemerintahan dalam hal ini pemerintah sudah menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal dan terutama pemanfaatan teknologi dibuat guna melayani masyarakat secara luas. Dengan menggunakan teknologi sebagai alat pengolahan data, pemerintah dapat mengolah data seperti data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Pemerintah menggunakan komputer untuk menangani masalah administrasi.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan diberbagai sektor. Pemerintah tidak ingin ketinggalan untuk memanfaatkan perkembangan komputer cukup signifikan. Pemanfaatan media komputer pada pemerintahan sangatlah mempengaruhi kinerja dalam pengolahan data-data.

E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan publik terjadi begitu intens karena bersifat online. Penyederhanaan birokrasi terjadi karena untuk menyampaikan ide, keluhan masyarakat tidak harus mengantri. Terjadinya komunikasi yang dilakukan pada warga dengan pemerintah ataupun sebaliknya, adanya peningkatan efisiensi pada suatu organisasi, tentunya dapat menghemat pembayaran pajak. Layanan public online merupakan salah satu hasil dari penerapan e-government. Masyarakat

dengan mudahnya melaporkan suatu keluhan ataupun keresahan yang terjadi pada lingkungan.

Sejak tahun 1995 e-government sudah mulai diterapkan contohnya Bina Graha Net yang berada di Istana Negara, lalu muncullah website instalasi pemerintahan. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah awal dari peningkatan perkembangan e-government. E-government meningkat secara signifikan tidak hanya pada pemerintahan pusat namun pemerintahan daerah saat ini sudah mulai menggunakannya.

a. Definisi E-government

E-government dapat didefinisikan sebagai pelayanan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.

b. Manfaat E-government

- 1) Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat.
- 2) Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya.
- 3) Menghemat biaya administrasi.
- 4) Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi.

c. Maksud serta tujuan dari peningkatan E-government

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas terkait proses administrasi Negara atau keperluan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan tercapai :

- 1) Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjangkaran informasi kepada layanan publik yang berkualitas.
- 2) Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis.
- 3) Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.

- 4) Transaksi serta layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi.

2. Pemicu Utama E-government

Negara Indonesia terhitung terlambat dalam menerapkan dan mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

- a. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
- b. Sistem administrasi sedang dalam proses pengembangan.

Perkembangan aplikasi di negara maju sangat cepat. Cepatnya perkembangan aplikasi komputer tersebut sudah mulai menimbulkan masalah untuk negara-negara tersebut sehingga hal tersebut merupakan hal serius sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang perkembangannya cukup pelan dan belum menimbulkan masalah yang butuh penanganan khusus.

Pemicu utama perkembangan e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu :

- a. Era globalisasi yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar mengontrol setiap isu yang ada. Pemerintah Tentunya harus mengambil reposisi dalam sebuah negara, dari mulai yang internal dikepemerintahan maupun pada masyarakat dimana pemerintah harus benar-benar memperhatikan semua aspek pada masyarakat.
- b. Akibat kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk mengakses sebuah data atau informasi yang ada. Peranan pemerintah untuk mengatur bagaimana menyikapi dalam melayani masyarakat, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat yang mengambil alih.
- c. Peningkatan pada kualitas pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari

mesinnya. Pada kinerja di sektor swasta percepatan kemajuan terbilang lebih lambat, sehingga masyarakat tahu adanya sebuah ketidak sejajaran pada sistem pelayanan. Secara tidak langsung masyarakat menghimbau kepada pemerintah bagaimana caranya agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Ketiga aspek tersebut merupakan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat pada pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya yang lebih signifikan, dengan adanya teknologi.

3. Strategi Pengembangan E-government

Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi, diantaranya :

- a. Sistem pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat dipercaya.
- b. Pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, harus mengikut sertakan dunia usaha.
- c. Sistem manajemen pada proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- d. Dalam pengembangan industri telekomunikasi dan informasi, dunia usaha harus memanfaatkan teknologi.
- e. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
- f. Pengembangan kapasitas SDM ditubuh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan meningkatnya e-literacy masyarakat.

Beberapa contoh aplikasi yang menunjang administrasi pemerintah dan sukses memberikan pelayanan maupun informasi yang berguna bagi masyarakat, antara lain :

- a. mCity

Aplikasi mCity adalah sebuah aplikasi mengenai informasi suatu kota yang bisa diakses melalui *smartphone*. Wisatawan dapat mencari tahu tentang kota tujuan dengan bantuan aplikasi mCity. Singkatnya, aplikasi ini dapat diartikan sebagai penunjuk jalan serta pemberi informasi mengenai suatu kota. Informasi lengkap mengenai kota tersebut seperti info tentang kuliner, tempat wisata, hingga penginapan.



Gambar 5.1 Aplikasi mCity

b. Qlue

Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah di DKI Jakarta yang diluncurkan pada desember 2014. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk menginformasikan kerusakan fasilitas, keluhan dan sebagainya. Selain itu masyarakat dapat mengupload foto jika ada masalah yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat tersebut berada.



Gambar 5.2 Aplikasi Qlue

c. Laporan!

Aplikasi Laporan! merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan dari masyarakat yang berbasis media sosial. Proses penanganan keluhan pada aplikasi ini dapat dipantau dan diawasi oleh publik. Selain untuk menyampaikan laporan, aplikasi ini juga terdapat fitur dialog virtual antara pemerintah dan masyarakat.



Gambar 5.3 Aplikasi Laporan!

d. Info BMKG

Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Pada aplikasi ini kita bisa melihat perkiraan cuaca, analisis iklim, dan informasi terjadinya gempa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi jika gempa yang terjadi berpotensi tsunami. Aplikasi inipun memuat press release jika ada himbauan ataupun pernyataan resmi dari pihak BMKG.



Gambar 5.4 Aplikasi BMKG

e. BPOM Mobile

Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dalam keterangannya di Playstore, pada aplikasi ini masyarakat bisa mengecek suatu produk menggunakan Kode QPR ataupun Kode Batang. Dalam aplikasi ini masyarakat bisa juga menyampaikan aduan terhadap suatu produk kepada BPOM.



Gambar 5.5 Aplikasi BPOM

4. Tugas Humas Pemerintah

Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Transparansi dalam menjalankan fungsi sebuah lembaga serta transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui suatu kebenaran. Sebagai jembatan informasi antara suatu lembaga dengan masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lembaga di pemerintahan sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga menurut yang dikutip oleh Amalia (2012):

- a. Menurut Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan kegiatan utama pemerintah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus memiliki birokrasi yang sederhana.
- b. Menurut Cutlip.C dan Broom (2007:468) praktisi humas pemerintah memiliki tugas utama yakni memberikan informasi. Harus diingatkan juga bahwa dalam sistem politik harus mampu memberi jarak (membatasi) peran khusus.

Joice J Gordon mengartikan humas seharusnya berperan khusus yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut tugas humas yang dijelaskan Gordon:

- a. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konstituen tentang agenda pemerintahan.
- b. Memastikan bahwa adanya suatu kerjasama yang aktif di dalam sebuah program pemerintahan dan adanya kewajiban untuk mematuhi kebijakan.
- c. Memajukan dan mendorong masyarakat agar dapat mendukung kebijakan serta program pemerintah.
- d. Dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

5. Isu sosial dan masalah

Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang muncul dari penerapan sistem eGovernment.

- a. Semakin bebasnya dalam hal akses situs pemerintah, dapat menimbulkan cyber crime sehingga dapat merusak sistem komputer pada e-government.
- b. Semakin berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah dengan masyarakat.
- c. Kurangnya pengetahuan antara masyarakat satu dengan yang lainnya dalam penggunaan e-government, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas.
- d. Kurangnya pelayanan yang diberika, karena sistem manajemen atau proses kerja dalam hal kesiapan prosedur dan peraturan masih membatasi SDM.
- e. Belum kuatnya strategi mengenai anggaran yang digunakan untuk pengembangan situs e-government.
- f. Sejumlah faktor seperti keamanan informasi, otentikasi, dan standarisasi antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
- g. Kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet masih terdapat kesenjangan. Meskipun telah lama diatur dalam undang-undang untuk segera diterapkan di seluruh sendi pemerintahan, namun tidak semua daerah menerapkan sistem e-government.

C. SOAL LATIHAN/TUGAS

1. Jelaskan pengertian dari e-government!
2. Menurut anda apa peranan komputer di bidang pemerintahan?
3. Bagaimana penerapan e-government yang benar?
4. Faktor-faktor apa saja yang akan mendorong e-government di dalam pemerintahan?
5. Sebutkan manfaat e-government bagi masyarakat!
6. Bagaimana perkembangan e-government di Indonesia?

D. REFERENSI

- E.S. Holle. 2011. *Pelayanan Publik Melalui Electronic Goverment: Upaya Meminimalisir Praktek dalam Administrasi Dalam Meningkatkan Public Service*. Jurnal SASI, 21-30.
- Forman, M. (2005). *Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government*. *Journal E-Government and Information Technology*, Pg. 27.
- Gauld, R. G. 2010. *Do they want it? Do they use it? The demand-side of e-government in Australia and New Zealand*. *Government Information Quarterly*, 177-186.
- Kase, J. (2010). *Perencanaan Strategis Sistem Informasi (SI) Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Sara Hofmann, M. R. 2012. *Identifying Factors Of E-Government Acceptance A Literature Review*. *Thirty Third International Conference on Information Systems*, (pp. 1-19). Orlando.
- Rachel Anly Marilyn Lingkanwene Wullur, Herman Karamoy, Winston Pontoh 2016. *Jurnal Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Psak No.14 Pada Pt. Gatraco Indah Manad*.